

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan. Pajak memiliki peranan penting sebagai sumber penerimaan utama Negara. Secara garis besar, pajak terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pemerintah pusat dan pembangunan. Pajak pusat juga dapat diartikan sebagai pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jendral Pajak dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran rutin negara yang tercakup dalam APBN. Sementara pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah.

Beberapa pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea materai dan pajak bumi dan bangunan. Pajak daerah ada dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak daerah yang termasuk ke dalam pajak provinsi antara lain Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Pajak Rokok dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak daerah yang digolongkan sebagai pajak kabupaten/kota yaitu Pajak Hotel, Pajak

Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Penerangan Jalan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Saya tertarik untuk mengangkat masalah mekanisme pemungutan BPHTB sebagai tugas akhir dari kegiatan magang yang saya laksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dari tanggal 03 Februari- 30 Maret 2020.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun masalah yang dibahas dalam laporan ini adalah:

- 1) Bagaimana pemungutan BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang?
- 2) Bagaimana perkembangan penerimaan BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang?

### **1.3 Tujuan Magang**

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam kegiatan magang ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemungutan BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan penerimaan BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

### **1.4 Manfaat Magang**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan magang sebagai berikut:

Bagi penulis :

1. Sebagai sarana latihan dan aplikasi teori-teori yang didapat pada saat perkuliahan kedalam praktek kerja yang sesungguhnya.
2. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang pekerjaan di lapangan kerja.
3. Meningkatkan kreativitas dan keterampilan.
4. Mendapatkan pengalaman untuk menghadapi dunia kerja di masa yang akan datang.
5. Memahami pemungutan BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

Bagi Instansi Pemerintah (Badan Pendapatan Daerah Kota Padang) :

1. Dapat membina kerjasama antara lembaga pendidikan dengan instansi pemerintahan.
2. Dapat membantu kelancaran aktivitas kerja pada BAPENDA Kota Padang dengan adanya mahasiswa magang.
3. Sebagai wujud partisipasi BAPENDA Kota Padang untuk membantu mahasiswa dalam hal memberikan pengetahuan mengenai pengenalan dan pemungutan BPHTB di Kota Padang.

Bagi Universitas Andalas:

1. Menambah hubungan kerjasama antara pihak Universitas Andalas dengan instansi pemerintah khususnya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang.
2. Menyediakan test dunia pekerjaan yang nyata bagi para lulusan.
3. Mendorong kemajuan alumni di masa mendatang.

4. Mempromosikan sumber-sumber potensial dari Universitas.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN :**

Bab ini terdiri dari latar belakang penulis dalam pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, serta sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI :**

Bab ini menjelaskan tentang pengertian BPHTB, subjek dan objek BPHTB, dasar hukum BPHTB, dasar pengenaan BPHTB, tariff pajak BPHTB, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak (NPOPTKP), tata cara untuk menentukan besarnya NPOPTKP, tarif pemungutan BPHTB.

### **BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI PEMERINTAH :**

Bab ini akan membahas gambaran umum Badan Pendapatan Daerah yang meliputi sejarah berdirinya instansi pemerintah, visi dan misi, tugas pokok, dan fungsi serta struktur organisasi.

### **BAB IV ANALISA DAN HASIL PENELITIAN :**

Bab ini penulis akan menguraikan tentang pengenaan dan pemungutan BPHTB, serta hal-hal yang berkaitan dengan BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

### **BAB V PENUTUP :**

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh pembahasan dengan menarik kesimpulan atas jawaban permasalahan serta dalam bab ini juga akan memberikan saran yang relevan sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan.

